



KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Salifa

Universitas Holu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: salifa@gmail.com

Info Article

Received :
10 Maret 2023
Revised :
07 April 2024
Accepted :
01 Mei 2024
Publication :
31 Mei 2024

Keywords:

State, Regional,
Financial

Kata Kunci:

Negara, Daerah,
Keuangan

*Licensed Under a
Creative Commons
Attribution 4.0
International
License*



Abstract: *This research is entitled State and Regional Finance Performance of South Konawe Regency. This study aims to determine the State and Regional Financial Performance of South Konawe Regency. The data analysis method is descriptive analysis, with the ratio of financial independence analysis, the degree of fiscal decentralization of South Konawe Regency from 2016 to 2020. The results of the study are Effectiveness can be concluded that the effectiveness of local taxes in the period 2016-2020 has increased. So based on the criteria or indicators of effectiveness, it can be said that the effectiveness of local taxes in South Konawe Regency is categorized as very effective so that this shows that the Regional Financial Management Agency of South Konawe Regency is very effective in managing local taxes, the contribution of local taxes has been done it appears that in the period 2016-2020 it is very good. In 2017 the contribution was the largest at 96.91% and in 2018 it had the smallest contribution rate at 68.38%. The average percentage of Local Tax Contribution to Local Revenue from 2016-2020 is 80.41%, which is included in the Very good category because it is above 50%.*

Abstract: penelitian ini berjudul Keuangan Negara dan Daerah Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keuangan Negara dan Daerah Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Metode analisis datanya adalah analisis deskriptif, dengan rasio analisis kemandirian keuangan, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hasil penelitian adalah Efektivitas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami Peningkatan. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan di kategorikan Sangat efektif sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sangat efektif dalam mengelola Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 sangat baik. Pada tahun 2017 kontribusinya adalah yang terbesar yaitu sebesar 96,91% dan pada tahun 2018 memiliki tingkat kontribusi yang terkecil yaitu sebesar 68,38%. Persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 adalah sebesar 80,41% termasuk dalam kategori Sangat baik karena berkisaran di atas 50%

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform.

Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat di dalamnya.

Ada tiga hal mendasar yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah, yaitu adanya kewenangan daerah secara yuridis untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, adanya legitimasi dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan adanya tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan daerahnya.

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011: 81, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah

selama satu tahun. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi.

Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diatur oleh Hukum. Dasar Hukum yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.
- d. UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- m. Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau Jmemenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.

Kinerja Keuangan Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, (2002). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Otonomi daerah ditunjukkan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung. (Adi : 2012). Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Hamzah : 2007).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015:20) "Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuannya". Sedangkan Efektivitas menurut Mahmudi (2016:86) yakni : "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian "Kontribusi adalah sumbangan", sedangkan menurut kamus ekonomi (Guritno, 1992:76) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode TA 2003 – 2007 memiliki kemandirian keuangan sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Parman Faisal (2017), “Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 2012-2015” Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012-2015 mengalami model yang berbeda-beda tiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012-2015 tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2015.

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pendapatan daerah yang meliputi (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya

Komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Sebagai daerah otonom baru (dimekarkan sejak tahun 2003 dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Konawe), sangat menarik untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Khususnya pada aspek Kemandirian keuangan dan efektifitas sumber-sumber PAD (efektifitas pajak daerah), kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD (kontribusi pajak daerah terhadap PAD) di harapkan pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis Kemandirian Keuangan Efektivitas sumber-sumber PAD dan Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD di Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti mengangkat judul “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan”.

METODE PENELITIAN

Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada kabupaten Konawe Selatan dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan berupa rasio kemandirian keuangan, Efektivitas dan efisiensi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. jenis penelitian ini merupakan kuantitatif deskriptif.

Penelitian ini dikatakan kuantitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan BPS kabupaten Konawe Selatan. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dengan rasio analisis kemandirian keuangan, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut.

1. Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo, 2001 dalam (Nataludin:69) kriteria kemandirian.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan

Kriteria Kemandirian Keuangan	Kemandirian %
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25-50%
Sedang	50-75%
Tinggi	75-100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

2. Analisis Efektivitas Sumber-sumber PAD (Pajak Daerah)

Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Besarnya tingkat efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:164) :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90-100%	Efektif
> 80-90%	Cukup Efektif
> 60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

3. Analisis Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap Total PAD (Pajak Daerah)

Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:163) :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang

20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Kemandirian Keuangan Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020

Daerah Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016-2020, maka Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020

TA	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi+Pinjaman (Rp)	Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
2016	37.011.710.261	5.947.764.000	6,22	Instruktif	Sangat Kurang
2017	52.424.872.726	-	-	Instruktif	Sangat Kurang
2018	68.908.750.346	-	-	Instruktif	Sangat Kurang
2019	81.314.566.003	-	-	Instruktif	Sangat Kurang
2020	66.194.958.213	480.000.000	13,7	Instruktif	Sangat Kurang
Rata- rata			9,96	Instruktif	Sangat Kurang

Sumber: DJPK. Kemenkeu. Kab. Konawe Selatan T.A 2016-2020 (data di olah)

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2016- 2020 adalah 9,96% yang berarti sangat kurang. Hasil tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu 13.7%, dan terendah tahun 2017,2018, dan 2019 yaitu 0.00%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2020 disebabkan adanya peningkatan PAD lebih besar dari peningkatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah akan dibarengi dengan penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah, dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode TA 2003 – 2007 memiliki kemandirian keuangan sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dan temuan penelitian Arifin (2015) yang menunjukkan bahwa Provinsi Riau selama periode TA 2005 – 2013 memiliki kemandirian keuangan daerah sangat rendah, atau pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan sangat rendah.

Analisis Efektivitas Sumber-sumber PAD (Pajak Daerah) Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020

Analisis Efektivitas Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2002:129).

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target penerimaan PD (Rp)	Realisasi penerimaan PD (Rp)	Tingkat Efektif (%)	Kriteria
2016	7.567.000.000	10.332.424.088	136,54	Sangat Efektif

2017	7.670.500.000	13.987.922.288	182,35	Sangat Efektif
2018	16.900.000.000	18.033.846.956	106,70	Sangat Efektif
2019	25.000.000.000	20.739.735.071	82,95	Cukup Efektif
2020	25.075.000.000	19.329.939.959,00	77,08	Kurang Efektif
Rerata			117,12%	Sangat Efektif

Sumber : DJPK. Kemenkeu LRA dan APBD kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2020 (data di olah)

Berdasarkan pada tabel 5 tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2016 merupakan tingkat Efektivitas yang tinggi dengan persentase mencapai 136,54% dan tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2017 merupakan tingkat yang tertinggi mencapai 182,35%. Sementara pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak daerah tergolong sangat efektif dengan presentase mencapai 106,70%. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas mengalami penurunan yang drastis dengan presentase mencapai 82,97%. Hal tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan PD lebih kecil dari target penerimaan PD. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Konawe Selatan mengalami penurunan dengan presentase hanya mencapai 77,08%, sehingga tergolong kurang edektif.

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata persentase mencapai 117,21% jadi berdasarkan kriteria atau indikator Efektivitas maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Konawe Selatan termasuk dalam kategori Sangat Efektif.

Analisis Kontribusi Sumber-sumber Terhadap Total PAD (Pajak Daerah) Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Hasil Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Realisasi penerimaan PD (Rp)	Realisasi penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Kriteria
2016	10.332.424.088	14.380.680.285	71,84	Sangat Baik
2017	13.987.922.288	14.433.778.545	96,91	Sangat Baik
2018	18.033.846.956	26.369.448.274	68,38	Sangat Baik
2019	20.739.735.071	27.598.971.975	75,14	Sangat Baik
2020	19.329.939.959,00	21.527.660.847	89,79	Sangat Baik
Rerata			80,41%	Sangat Baik

Sumber : DJPK. Kemenkeu LRA dan APBD kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 analisis data yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2016 dengan persentase Kontribusi Pajak Daerah sebesar 71,84%. Pada tahun 2017 merupakan Kontribusi Pajak Daerah yang terbesar yaitu sebesar 96,81%. Pada tahun 2018 dengan tingkat kontribusi Pajak Daerah mencapai 68,38%. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2019 hanya mencapai 75,14%. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami Kenaikan dengan persentase mencapai 89,79%

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami Fluktuasi. Persentase rata-rata Kontribusi Total Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2020 adalah sebesar 80,41% jadi berdasarkan kriteria atau indikator Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Konawe Selatan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Menurut hasil penelitian dari Sukur (2015) yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tergolong Tidak Efektif dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori Kurang.

Selanjutnya hasil penelitian dari Khatmi Tamtami Nisa (2015) yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa Kontribusi Pajak Parkir terhadap

Pendapatan Asli Daerah masih tergolong Kecil. Persentase tingkat Efektivitas Pajak Parkir dari tahun ke tahun meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014 tergolong Tidak Efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut penelitian mereka tidak terlalu berbeda jauh mengatakan tingkat Efektivitas dan Kontribusinya dikategorikan Tidak Efektif dan tergolong Kecil, tetapi penelitian yang dilakukan peneliti dapatkan berbeda dengan hasil penelitian tersebut karena peneliti mendapatkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikategorikan Sangat Efektif dan tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong kategori Sangat Baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kab. Konawe Selatan selama waktu tiga tahun terakhir masih rendah sekali dan menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat masih tinggi dengan rata-rata kemandirian keuangan selama tiga tahun terakhir mencapai 4,42%
2. Berdasarkan hasil analisis Efektivitas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami Peningkatan. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan di kategorikan Sangat efektif sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sangat efektif dalam mengelola Pajak Daerah.
3. Berdasarkan hasil analisis Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 sangat baik. Pada tahun 2017 kontribusinya adalah yang terbesar yaitu sebesar 96,91% dan pada tahun 2018 memiliki tingkat kontribusi yang terkecil yaitu sebesar 68,38%. Persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 adalah sebesar 80,41% termasuk dalam kategori Sangat baik karena berkisaran di atas 50%

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, W. F. ., Qolbi, S. W. ., Aiman, A. N. ., Widyawati, W. ., & Latifah, E. . (2023). PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 11–20. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.538>
- Aji, M. D. P. ., Putra, B. Q. L. ., & Soeroto, W. M. . (2024). ANALISA PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BATUBARA. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i2.992>
- Ariansyah, M., dkk., (2014). TINGKAT KETERGANTUNGAN FISKAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA JAMBI, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, ISSN : 2338-4603, Vol. 1 No. 3, Januari-Maret 2014, hal 159 – 164.
- Arusani, A., Kusuma, U. W. ., & Harimau, L. I. . (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 123–136. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53>
- Arifin Kasman, dkk, (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI RIAU PERIODE 2005-2013, *Jurnal Economica*, Vol. I No. 1 Januari 2015, hal. 87 – 104.
- Bisma, Gde, I Dewa, dkk. (2010), EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2003 – 2007, *Ganec Swara*, Edisi Khusus, Vol. 4, No.3, Desember 2010, hal. 75 – 86.
- Darise, Nurlan. (2009). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Jakarta: PT Indeks.
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- Faisal, Parman. (2017). KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- 2012-2015. Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Halim, A. (2008). AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat. S. (2008). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF STATE-SOCIETY RELATION. *Jurnal Politik*, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta
- Jaya, A. ., Muthalib, A. A. ., & A.Sabilalo, M. . (2023). ANALISIS PENERAPAN OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 90–115. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.1057>
- Kamara, O. ., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH HUBUNGAN ATASAN BAWAHAN, DISIPLIN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN WENGGEDUKU KABUPATEN KONAWE. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 3(1), 20–40. <https://doi.org/10.62668/jiar.v3i1.1016>
- Mardiasmo. (2004). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). OTONOMI DAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. Andi. Yogyakarta
- Muslim, C. ., Saenong, Z. ., & Hastuti, H. (2023). PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI 2015-2021. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(04), 233–240. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.930>
- Nisa, Khatmi Tamtami. (2015). ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR. Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Puspita Sari, I., Safaruddin, S., & Prasetyo, H. . (2023). STRATEGI KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK OGAN KOMERING ULU (SUMATERA SELATAN). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(03), 150–162. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.588>

- Rahmatia. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 74–87. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.133>
- Rajab Abdul Rahman. (2022). ANALISIS SEKTOR EKONOMI POTENSIAL DI KOTA BAUBAU DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BCG. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 45–60. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.125>
- Riaweni, W. O. I. ., Sutrisno, A. ., Musliani, M., & Masna, M. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BUMBES BERSAMA DESA KAPOTA. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 155–164. <https://doi.org/10.62668/>
- Rismanto Runda, Muthalib, A. A. ., & Sabilalo, M. A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN, SEMANGAT KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 3(01), 01–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v3i01.1014>
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18. <https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 37–44. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124>
- Setiyawati, P. S. ., Nuroini, D. A. ., Lestari, D. ., Farida, E. A. ., Khoiruddin, M. ., & Latifah, E. . (2023). PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASHUR DALAM AKUNTANSI MURABAHAH DALAM METODE PENGAKUAN

- KEUNTUNGAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 60–69. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.537>
- Situngkir, Freddy, dkk, (2014). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA, *Jurnal Ekonom*, Vol 17, No 3, Juli 2014, hal. 125 – 137.
- Sukur. (2015). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PAD DI KABUPATEN KONAWE. Skripsi.Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Suute, A., Mas'ud, A. ., & Yunus, A. (2024). PENGARUH TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN EFEKTIVITAS KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 3(1), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jjar.v3i1.1015>
- Suyono, S., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1013>
- Susi Sulastrri. (2022). ANALISIS DANA DESA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 28–37. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.113>
- Syamsir, S., Razak, A., & Yunus, A. (2024). PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I MOLAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 20–39. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1012>
- Swastika, Y. ., & Hamid, N. . (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GENERASI SANDWICH OVERCONFIDENCE DAN DUAL ERNEST TERHADAP PERILAKU KEUANGAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal*

Economics, Technology And Entrepreneur, 2(03), 112–118.

<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i03.753>

Taufikurrahman, T., Nisrina, A. Y. ., Sutrisno, A. I. ., Meiyantika, A. S. ., Pranata, H. A. ., & Bintari, P. F. . (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UMKM "FINZA COOKIES AND CAKE" DI DESA MRANGGONLAWANG KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 90–96.
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.685>